



Bank Kerta Raharja (Persero)

Laporan Tata Kelola (GCG) Tahun 2023

Jalan Raya Soreang No. 26 Soreang
Kabupaten Bandung 40912

 (022) 589 3334  bprkertaraharja_official www.bankkertaraharja.co.id

Bersama Kita Bangkit



Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Kerta Raharja

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

666498-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-602638-31012024140317

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

akunting@bankkertaraharja.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-31 14:03:17



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kerta Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jalan Raya Soreang Nomor 26 Bandung

Nomor Telepon : 022-5893334

Penjelasan Umum : Dengan semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR), maka semakin meningkat pula risiko BPR sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh BPR. PT BPR Kerta Raharja (Persero) adalah salah satu BPR yang memandang penting penerapan tata kelola dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi pemangku kepentingan (stakeholder) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku.

B. Dasar Penyusunan: Dasar penyusunan Laporan Penerapan Tata Kelola yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat; 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat; 5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat; 6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

C. Prinsip-Prinsip Tata Kelola: Pelaksanaan tata kelola BPR memperhatikan 5 (lima) prinsip dasar, sebagai berikut: 1. Keterbukaan (Transparency); 2. Akuntabilitas (Accountability); 3. Pertanggungjawaban (Responsibility); 4. Independensi (Independency); 5. Kewajaran (Fairness).

D. Struktur Tata Kelola BPR: Struktur Tata Kelola BPR dibuat untuk penerapan check and balance, sistem pengendalian intern yang baik serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kerta Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	AEP HENDAR CAHYAD	Direktur Utama	1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR; 2. Mengelola BPR sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Anggaran Dasar BPR; 3. Menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 4. Memastikan terpenuhinya jumlah SDM yang memadai secara kuantitas maupun kualitas; menindaklanjuti temuan audit intern maupun ekstern dan hasil pengawasan Dewan Komisaris maupun OJK; 5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS; 6. Mengungkap kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai; 7. Menyediakan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris; 8. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan Program APU & PPT; 9. Menetapkan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko.
2	BOY FERLI SUMAATMAJA	Direktur	1. Membantu Direktur Utama atas pelaksanaan kepengurusan BPR; 2. Mengelola BPR sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Anggaran Dasar BPR; 3. Menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 4. Memastikan terpenuhinya jumlah SDM yang memadai secara kuantitas maupun kualitas; menindaklanjuti temuan audit intern maupun ekstern dan hasil pengawasan Dewan Komisaris maupun OJK; 5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS; 7. Menyediakan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris; 8. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan Program APU & PPT.
3	ABDUL AZIIZ JAYAWISASTRA	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	1. Membantu Direktur Utama dalam mengelola dan pengawasan operasional BPR; 2. Menyusun RBB untuk diajukan dan mendapat persetujuan RUPS; 3. Melaksanakan penerapan manajemen risiko pada setiap unit dan jenjang organisasi; 4. Melaksanakan monitoring pelaksanaan RBB; 5. Melaksanakan pengendalian keuangan secara menyeluruh; 6. Memastikan bahwa proses manajemen risiko pada aktivitas fungsional usaha bank dilakukan secara terintegrasi pada unit jenjang organisasi; 7. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha sesuai dengan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya; 8. Memastikan terhadap pemenuhan komitmen BPR terhadap otoritas.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

0

Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kerta Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kerta Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	UBEN YUNARA DASA PRIATNA	Komisaris Utama	1. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; 3. Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB yaitumenge debitur inti, debitur terkait dan debitur bermasalah; 4. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan Program APU & PPT; 5. Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program APU & PPT; 6. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; 7. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE audit intern BPR, Auditor Ekstern, OJK, hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan otoritas lainnya; 8. Memberitahukan kepada OJK : a. Pekanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; 9. Memastikan bahwa Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko menjalankan tugasnya secara efektif; 10. Melakukan review dan menyetujui RBB dan Laporan Tahunan.
2	IDAT MUSTARI SUNARYA	Komisaris	1. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; 3. Memastikan bahwa Dirksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lainnya 4. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan APU & PPT 5. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan dan pedoman Manajemen risiko , Kebijakan dan Pedoman APU & PPT, 6. Memberitahukan kepada OJK apabila ada : a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan/atau b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. 7. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan materi serta agenda rapat komisaris. 8. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris. 9. Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (fairness) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholders lainnya.

Rekomendasi Kepada Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kerta Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kerta Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kerta Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kerta Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kerta Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kerta Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kerta Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	AEP HENDAR CAHYAD	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"
2	ABDUL AZIIZ JAYAWISASTRA	0	0	0
3	BOY FERLI SUMAATMAJA	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kerta Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	AEP HENDAR CAHYAD	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"
2	BOY FERLI SUMAATMAJA	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"
3	ABDUL AZIIZ JAYAWISASTRA	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kerta Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kerta Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kerta Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	UBEN YUNARA DASA PRIATNA	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"
2	IDAT MUSTARI SUNARYA	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kerta Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	UBEN YUNARA DASA PRIATNA	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"
2	IDAT MUSTARI SUNARYA	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kerta Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	889700000	2	678334700
2	Tunjangan	3	1345887800	2	0
3	Tantiem	3	201069272	2	61867468
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	3	1183883444	2	357241407
	Total		3620540516		1097443575

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kerta Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	Mobil dinas	Mobil dinas
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan
4	Fasilitas lainnya	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kerta Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,71	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,33	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,50	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,48	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kerta Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	26-01-2023	2	Rapat Evaluasi Pencapaian RBB Tahun Buku 2022
2	15-03-2023	2	Rapat Koordinasi BPR Kerta Raharja
3	02-05-2023	2	Rapat Evaluasi Perkembangan Kondisi BPR Periode Triwulan I Tahun 2023
4	19-09-2023	2	Rapat Perkembangan Kredit
5	23-10-2023	2	Rapat Evaluasi Triwulan III tahun 2023
6	13-12-2023	2	Rapat Fungsi Kepatuhan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dilakukan secara tatap muka dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kerta Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	UBEN YUNARA DASA PRIATNA	6	0	100,00
2	IDAT MUSTARI SUNARYA	6	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

seluruh rapat dewan komisaris yang diadakan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris melalui metode tatap muka

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kerta Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kerta Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan otoritas Jasa Keuangan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPR telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	3	Rencana bisnis BPR telah disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit a.faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR. b.azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan c.penerapan manajemen risiko.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	3	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kerta Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kerta Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kerta Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kerta Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kerta Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kerta Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	3	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kerta Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2023